

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang:

- Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945
- Indonesia. *Undang –Undang Tentang Penataan Ruang*. UU No. 26 Tahun 2007, LN No. 68 Tahun 2007, TLN No. 4725.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Wajib Daftar Perusahaan*. UU No. 3 Tahun 1982, LN No. 7 Tahun 1982, TLN No.3214.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU No.12 Tahun 2011, TLN No. 5234.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*. UU No. 5 Tahun 2004, LN No.9 Tahun 2004, TLN No. 4359.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*. UU No. 3 Tahun 2009, LN No. 3 Tahun 2009, TLN No. 4958.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah*. UU No. 32 Tahun 2004, LN No. 125 Tahun 2004, TLN No. 4437.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia*. UU No. 29 Tahun 2007, LN No. 93 Tahun 2007, TLN No. 4744.

### Peraturan Menteri:

- Peraturan Menteri Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*, Permen No. 24 Tahun 2006.
- Peraturan Menteri Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah*. Permen, No. 20 Tahun 2008.
- Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No. 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan*. Permendag No. 7/M-DAG/PER/2/2017.

### Peraturan Daerah:

- DKI Jakarta. *Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030*. Perda No. 1 Tahun 2012, TLD No. 30.
- DKI Jakarta. *Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi*. Perda No. 1 Tahun 2014, LD No. 301 Tahun 2014.

### Intruksi Gubernur:

- DKI Jakarta. *Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Masa Transisi Untuk Perpanjangan Izin/Non Izin Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang*. Nomor 158 Tahun 2015.

Pengumuman:

BPTSP DKI Jakarta. *Pengumuman Tentang Masa Berlaku Dokumen Perizinan Dan Non Perizinan Pada Zonasi Yang Tidak Sesuai*. No. 241 Tahun 2016.

Buku:

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprudence*, Volume 1 Pemahaman Awal Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Edisi Kedua, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Fahmi Wibawa, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*. Jakarta: PT. Grasindo, 2007.
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Herman Hermit, *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Henry S. Siswosoediro, *Mengurus Surat-Surat Perizinan*. Jakarta: Visimedia, 2007.
- H. Zaeni Asyhandie, Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Iwan Kustiawan, *Perencanaan Kota*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016.
- M. Arszandi Pratama, Bayu Wirawan, Dinar Maria, Soly Iman Santoso, Galuh Shita Ayu Bidadari, *Menata Kota Melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Robinson Taringan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015 (Edisi Revisi).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.6, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014.

Wawancara:

- Hariyadi. wawancara dengan penulis, PTSP Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta, 21 Juli 2017.
- Laurencius Agust. wawancara dengan penulis, BPTSP Prov. DKI Jakarta, Jakarta, 7 Juli 2017.
- Merry Morfosa. wawancara dengan penulis, Kantor Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta , 25 Juli 2017.
- Roy M. Lumanauw, wawancara dengan penulis, Ruko Central Green

- Ville, Jakarta, 24 April 2017.
- Tatang Berajamusti. wawancara dengan penulis, PTSP Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta, 2 Mei 2017.
- Toto Sutrisna, wawancara dengan penulis, Ruko Cental Green Ville, Jakarta, 24 April 2017.
- Widi Nugroho. wawancara dengan penulis, PTSP Keluahan Duri Kepa, Jakarta, 2 Mei 2017.

Internet:

- Arief Maulana. “*Review Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*”. (On-line). Tersedia di <http://ariefmaulana90.blogspot.co.id/2010/08/review-undang-undang-nomotahun.htmlr-26-> (13 Maret 2017).
- Berita Jakarta. “*Aturan Zonasi Baru Diperdakan Tahun 2014*”. (On-line). Tersedia di: [http://www.beritajakarta.id/read/26189/Aturan\\_Zonasi\\_Baru\\_Diperdakan\\_Tahun\\_2014#.WRMoD9R97Dd](http://www.beritajakarta.id/read/26189/Aturan_Zonasi_Baru_Diperdakan_Tahun_2014#.WRMoD9R97Dd) (10 Mei 2017).
- Denny Zulkaidi. “*Meninjau Kembali Persoalan Hukum Kerangka Peraturan Penataan Ruang Kota di Indonesia*”, Jurnal PWK, 1995. (On-line). Tersedia di <http://www.sappk.itb.ac.id/jpwk/wp-content/uploads/2014/02/VOL-6-NO-17-3.pdf>, (15 Maret 2017).
- Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Kota medan, “*Konsep Dasar Hukum Tata Ruang*”. (On-line). Tersedia di <http://trtb.pemkomedan.go.id/artikel-744-konsep-dasar-hukum-tata-ruang.html> (13 November 2016).
- Hukum Online. “*Ini Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Sepanjang 2016*”. (On-line). Tersedia di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt585a6838b3278/ini-paket-kebijakan-ekonomi-pemerintah-sepanjang-2016> (8 Juli 2017).
- Hukum Online. “*Catat! Ini Kemudahan UKM dalam Paket Kebijakan XII*”. (On-line). Tersedia di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57221f10b40fd/catat-ini-kemudahan-ukm-dalam-paket-kebijakan-xii> (11 Juli 2017).
- Hukum Online. “*Permendag Baru Terbit, SIUP Tak Perlu Diperpanjang*”. (On-line) Tersedia di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58ae9dcb52098/permendag-baruterbit--siup-tak-perlu-diperpanjang> (11 Juli 2017).
- Indonesian Institute. “*Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*”. (On-line). Tersedia di <http://www.penataanruang.com/rtrw-nasional3.html> (13 Maret 2017).
- Kurniawan Akbar. “*Implementasi Kebijakan Tata Ruang Tentang Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu Di Kota Makassar*”. Skripsi S1 (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu politik, Univesitas Hasanudin, Makasar, 2015). (On-line), tersedia di

- [:http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/18183/Skripsi%20Kurniawan%20Akbar.PDF?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/18183/Skripsi%20Kurniawan%20Akbar.PDF?sequence=1). (5 Maret 2017).
- Kementerian PNN/Bappenas. “*PAKET KEBIJAKAN XII: Pemerintah Pangkas Izin, Prosedur, Waktu, dan Biaya untuk Kemudahan Berusaha di Indonesia*”. (On-line). Tersedia di <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/paket-kebijakan-xii-pemerintah-pangkas-izin-prosedur-waktu-dan-biaya-untuk-kemudahan-berusaha-di-indonesia/> (11 Juli 2017).
- RDTR DKI JAKARTA, “*Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta 2030*”, (On-line), tersedia di <http://rdtrdkijakarta.com/> (14 Juli 2017).
- Sjarifuddin Akil. “*,Pengembangan Wilayah Dan Penataan Ruang Di Indonesia Tinjauan Teoritis Dan Praktis*”, makalah, Kuliah Terbuka : Program Magister KAPET, Universitas Hasanuddin Makassar, (On-line). Tersedia di [http://geografi.ums.ac.id/ebook/perenc\\_kota/sumber/PaperUNHAS-KAPET.pdf](http://geografi.ums.ac.id/ebook/perenc_kota/sumber/PaperUNHAS-KAPET.pdf) (12 Maret 2017).
- Sovia Hasanah. “*Hukumnya Menggunakan Ruas Jalan untuk Pasar*”. (On-line). Tersedia di <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt587af4b2e8ccf/hukumnya-menggunakan-ruas-jalan-untuk-pasar>, (17 Maret 2017).
- Wordpress. “*Pengertian Badan Usaha Menurut Para Ahli dan Bentuk-Bentuknya*”. (On-line). Tersedia di <http://www.bimbingan.org/pengertian-badan-usaha-menurut-para-ahli.htm>, (17 Maret 2017).